



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

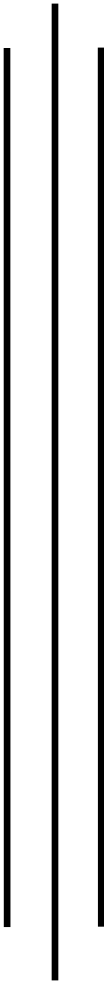
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERTAMANAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026.

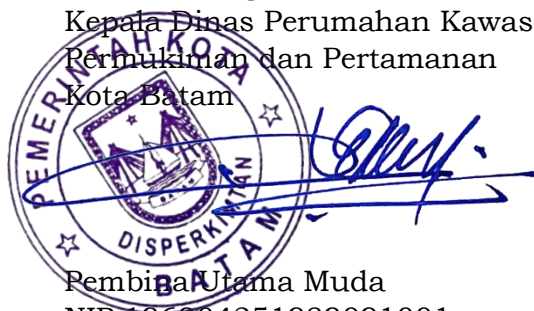
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan sebagian tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 21 Agustus 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam



Pembina Muda
NIP 196904251989091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2026	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 9
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	IV - 1
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	IV - 1
5.3 Rencana Tindak Lanjut	IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Triwulan I	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan I	II-8
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026	III-2
Tabel 3.2	RKPD Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026	III-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Menyusun perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang UU No. 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 29 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1722)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	86.38%	0.47%	0.55%
1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0,00	0
1.04.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	0.00	0
1.04.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0.00	0
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	0
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah yang dibangun/direhabilitasi	1 Unit	0.00	0
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	0.00	0
1.04.02.2.05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	72.75%	62.95%	86.53%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.04.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	0.00	0
1.04.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	5 Dokumen	0
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	100%	0.00	0
1.04.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	0.00	0
1.04.02.2.06.0005	Sub Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	0.00	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77,97%	40.65%	52.2%
1.04.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	12 Laporan	8.33	0
1.04.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	0.00	0
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	25,34 %	4.51%	9.4%
1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit	30	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.04.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	0.00	0
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-	0.00	0
1.04.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	9.8 Ha	5 Ha	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	31,33%	26.56%	84.8%
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	282 Lokasi	57 Lokasi	0
1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	0
1.04.05.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	434 Lokasi	57 Lokasi	0
1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	0.00	0
1.04.05.2.01.0011	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	73 Lokasi	0.00	0
1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lokasi	0.00	0
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PD	75,17	72.87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97	90	92.7
1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	50%	0
1.04.01.2.02.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	0
1.04.01.2.02.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0.00	0
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	95.95%
1.04.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 Orang	210 Orang	100%
1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	5 Dokumen	0
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	3.80%	0
1.04.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0.00	0
1.04.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	5 Orang	0
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	45.56%	17.86%
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	7 Paket	9.09%
1.04.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	25%
1.04.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	25%
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	66.07%	0
1.04.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	68 Unit	67 Unit	0
1.04.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	7 Unit	0
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	34.00%	25%
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	25%
1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	80%	5.93%
1.04.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	14 Unit	15.4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.04.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit	0
1.04.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luas RTH Publik	5,96%	5.98%	99.5%
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	316,07 Ha	314.27 Ha	99.5%
2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	42.77 Ha	41.27 Ha	96.5%
2.11.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit	0.00	0
2.11.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Unit	130 Unit	100%
2.11.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	85,66 Ha	85.66 Ha	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan SPM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No.	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 Triwulan II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	225	Ha	103.4	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	Nilai	90.48	Nilai	90,50	
3	Persentase Luas RTH Publik yang dikelola	Persentase	16.78	Persentase	16.69	

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing indikator kinerja mengalami progres/perkembangan yang cukup baik. Pada Triwulan I ini, pelaksanaan masing- masing program dan kegiatan penunjang indikator masih dalam tahap pengerjaan dan persiapan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Adapun isu-isu dalam penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam diantaranya sebagai berikut :

- a. Peningkatan taman kota dan pulau jalan menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang terbuka hijau yang indah, nyaman, dan berkelanjutan. Penghijauan, serta elemen pendukung secara optimal dapat memperindah wajah kota, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memberikan ruang terbuka hijau yang lebih asri bagi masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan Rusunawa melalui perbaikan hunian, yang diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rusunawa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat yang tinggal di kawasan ilegal atau rumah liar untuk pindah ke kawasan Rusunawa Pemerintah Kota Batam;
- c. Mutu pelayanan dasar pada perumahan dan kawasan permukiman ditingkatkan melalui penyediaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Ketersediaan jalan lingkungan, drainase, penerangan, batu miring , serta fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 40 (empat puluh) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.04.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN						257.227.249.060,00	207.210.400.430,00	(50.016.848.630,00)	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						209.430.135.289,00	177.035.705.925	(32.394.429.364,00)	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97	97	37.370.061.339	32.503.919.902,00	(4.866.141.437,00)	
			Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	75.17	75.17				
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	7.702.200,00	5.452.200,00	(2.250.000,00)	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	5.251.200,00	4.501.200,00	(750.000,00)	
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.451.000,00	951.000,00	(1.500.000,00)	

1.04.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	30.115.105.671,00	27.817.227.102,00	(2.297.878.569,00)	
1.04.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bu lan	210 Orang/bu lan	29.949.625.671,00	27.651.747.102,00	(2.297.878.569,00)	
1.04.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	165.480.000,00	165.480.000,00	-	
1.04.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100%	398.588.000,00	56.028.000,00	(342.560.000,00)	
1.04.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	189.620.000,00	0	(189.620.000,00)	
1.04.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	4 Orang	208.968.000,00	56.028.000,00	(152.940.000,00)	

1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100%	1.076.881.400,00	637.517.100,00	(439.364.300,00)	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.576.900,00	4.215.300,00	(3.361.600,00)	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11 Paket	448.001.300,00	406.943.400,00	(41.057.900,00)	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	92.723.200,00	37.822.400,00	(54.900.800,00)	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	12 Laporan	528.580.000,00	188.536.000,00	(340.044.000,00)	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100%	3.481.929.000,00	1.115.928.000,00	(2.366.001.000,00)	

1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	484.095.000,00	0	-	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	292.020.000,00	0	-	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81 Unit	68 Unit	528.531.700,00	369.180.300,00	(159.351.400,00)	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	43 Unit	1.546.405.300,00	746.747.700,00	(799.657.600,00)	
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	630.877.000,00	0	(630.877.000,00)	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100%	273.320.368,00	315.277.600,00	41.957.232,00	

1.04.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	228.333.600,00	315.277.600,00	86.944.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	44.986.768,00	0	(44.986.768,00)	
1.04.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100%	2.016.534.700,00	2.556.489.900,00	539.955.200,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	68.048.000,00	71.808.000,00	3.760.000,00	

1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	28 Unit	473.866.000,00	504.923.200,00	31.057.200,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	88 Unit	60.770.000,00	60.770.000,00	-	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	1.413.850.700,00	1.918.988.700,00	505.138.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	86.38 %	86.38%	11.918.908.976,00	17.135.901.162,00	5.216.992.186,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	930.347.900,00	429.356.700,00	(500.991.200,00)	

1.04.02.2.0 1.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulana Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	208.685.900,00	16.977.600,00	(191.708.300,00)	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	310.663.900,00	216.489.000,00	(94.174.900,00)	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	410.998.100,00	195.890.100,00	(215.108.000,00)	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah yang	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program	1 unit	1 unit		93.168.000,00	(12.349.800,00)	

1.04.02.2.03	Relokasi Program Kabupaten/Kota	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dibangun/direhabilitasi	pemerintah yang dibangun/direhabilitasi			105.517.800,00			
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	12 Rumah Tangga	105.517.800,00	93.168.000,00	(12.349.800,00)	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	Persentase sarusun layak huni	72,75 %	72.75%	10.552.855.276,00	10.086.571.110,00	(466.284.166,00)	

1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	10.552.855.276,00	10.086.571.110,00	(466.284.166,00)	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	100 %	100%	330.188.000,00	288.717.800,00	(41.470.200,00)	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	195.188.000,00	5.317.800,00	(189.870.200,00)	

1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun/terpelihara	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun/terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	135.000.000,00	283.400.000,00	148.400.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77.97 %	77.97%	18.388.279.195,00	20.202.301.786,00	1.814.022.591,00	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan	12 Laporan	12 Laporan	275.509.100,00	4.624.400,00	(270.884.700,00)	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	1 Laporan	275.509.100,00	4.624.400,00	(270.884.700,00)	

1.04.03.2.0 2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0 Dokumen	217.093.400,00	0	(217.093.400,00)	
1.04.03.2.02. 0008	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan /Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0 Dokumen	217.093.400,00	0	(217.093.400,00)	
1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	25,34 %	25.34%	17.895.676.695,00	20.197.677.386,00	2.302.000.691	
1.04.03.2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	26 Unit Rumah	60 Unit Rumah	759.148.800,00	1.265.998.440,00	506.849.640,00	

1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	331.095.600,00	242.695.800,00	(88.399.800,00)	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	9,8 Ha	10,65 Ha	16.555.546.295,00	18.688.983.146,00	2.133.436.851,00	
1.04.03.2.03.0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0,06 Hektar	0 Hektar	249.886.000,00	0	(249.886.000,00)	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani	16,25%	16,25%	646.980.000,00	628.500.000,00	(18.480.000,00)	

1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH di luar kawasan kumuh yang ditangani	Persentase RTLH di luar kawasan kumuh yang ditangani	8,96 %	8,96%	646.980.000,00	628.500.000,00	(18.480.000,00)	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	646.980.000,00	628.500.000,00	(18.480.000,00)	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA		Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,	31,33 %	31.33%	141.105.905.779,00	106.565.083.075,00	(34.540.822.704,00)	

			Sarana, dan Utilitas Umum)	Sarana, dan Utilitas Umum)						
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	282 Lokasi	282 Lokasi	141.105.905.779,00	106.565.083.075,00	(34.540.822.704,00)	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 Dokumen	3 Dokumen	298.405.800,00	297.452.400,00	(953.400,00)	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	1 Laporan	616.419.408,00	198.232.200,00	(418.187.208,00)	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	473.716.400,00	470.292.400,00	(3.424.000,00)	
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang	255 Lokasi	75 Lokasi	15.965.835.777,00	11.780.827.681,00	(4.185.008.096,00)	

	Utilitas Umum di Perumahan	Umum di Perumahan		Dilaksanakan Perbaikan						
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	500 Lokasi	454 Lokasi	123.751.528.394,00	93.818.278.394,00	(29.933.250.000,00)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						47.797.113.771,00	30.174.694.505,00	(17.622.419.266,00)	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						47.797.113.771,00	30.174.694.505,00	(17.622.419.266,00)	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Peningkatan luas RTH Publik	Persentase Peningkatan luas RTH Publik	6,01 %	5.96%	47.797.113.771,00	30.174.694.505,00	(17.622.419.266,00)	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	260,41 Ha	316,07 Ha	47.797.113.771,00	30.174.694.505,00	(17.622.419.266,00)	
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Ha	85.66 Ha	835.699.300,00	2.106.978.460,00	1.271.279.160,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24.55 Ha	42.77 Ha	13.187.370.099,00	7.232.033.699,00	(5.955.336.400,00)	

		Hijau (RTH)								
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit	41 Unit	15.594.476.600,00	11.681.547.500,00	(3.912.929.100,00)	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Unit	130 Unit	15.179.567.772,00	9.154.134.846,00	(6.025.432.926,00)	
1.04.2.11.0.00.01.0001	UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM						7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	86,38 %	86.38%	7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Persentase sarusun layak huni	Persentase sarusun layak huni	72,75 %	72,75 %	7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	31 Dokumen	12 Laporan	7.551.308.608,00	6.238.087.552,00	(1.313.221.056,00)	

1.04.02.2.05.0002		dan/atau Rumah Khusus	dan/atau Rumah Khusus							
J U M L A H							257.227.249.060,00	207.210.400.430,00	(50.016.848.630,00)	

Tabel 3.2 RKPD Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANO	REALISASICAPAIANRENJANOPTAHUN 2025	PRAKIRAA NCAPAIAN TARGET RENJAN OPTAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWA B
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN							264.778.557.668,00	188.754.553.004,00	207.210.400.430,00	- 57.568.157.238,00							164.775.241.077,00	

	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							216.981.443.897,00	161.976.745.081,00	177.035.705.925,00	- 39.945.737.972,00							137.272.571.715,00	
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							216.981.443.897,00	161.976.745.081,00	177.035.705.925,00	- 39.945.737.972,00							137.272.571.715,00	
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 Nilai	96 Nilai		97 Nilai	97 Nilai	37.370.061.339,00	32.707.030.714,00	32.503.919.902,00	- 8.889.366.850,00							28.480.694.489,00	
			Nilai SAKIP PD	80,17 Nilai	72,87 Nilai		75,17 Nilai	75,17 Nilai												
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0 %		1	100 %	7.702.200,00	7.702.200,00	5.452.200,00	- 2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		6200000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMAHAN

	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.251.200,00	5.251.200,00	4.501.200,00	- 750.000,00	Kota Batam, Sekupa ng, Sungai Harapa n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Imple menta si Refor masi Birokra si dalam rangka pening katan pelaya nan masya rakat			3.100.000,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	2.451.000,00	2.451.000,00	951.000,00	- 1.500.000,00	Kota Batam, Sekupa ng, Sungai Harapa n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Imple menta si Refor masi Birokra si dalam rangka pening katan pelaya nan masya rakat			3.100.000,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N

	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %	30.115.105.671,00	28.372.908.800,00	27.817.227.102,00	- 2.297.878.569,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		24.047.169.312,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang /bulan	211 Orang /bulan		115 Orang/bulan	210 Orang/bulan	29.949.625.671,00	28.207.428.800,00	27.651.747.102,00	- 2.297.878.569,00	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		23.873.229.312,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N	

														NJIAN KERJA						
	1.04.01. 2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Laporan	12 Laporan		12 Dokumen	12 Dokumen	165.480. 000,00	165.480. 000,00	165.480. 000,00	0	Kota Batam, Sekupa ng, Sungai Harapa n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Imple mentasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			173.940. 000,00	DINAS PERU MAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N
	1.04.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%		100%	100%	398.588. 000,00	108.250. 000,00	56.028.0 00,00	- 342.560. 000,00			Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper kuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Imple mentasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertamanya		180.784. 337,00	DINAS PERU MAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N

															penyelu dupan.					
	1.04.01. 2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	3 Paket	0 Paket		1 Paket	0	189.620. 000,00	0,00	0,00	- 189.620. 000,00	Kota Batam, Sekupa ng, Sungai Harapa n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat penceg ahan dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Imple menta si Refor masi Birokra si dalam rangka pening katan pelaya nan masya rakat			27.327.0 00,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N
	1.04.01. 2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	6 Orang		10 Oran g	4 Oran g	208.968. 000,00	108.250. 000,00	56.028.0 00,00	- 152.940. 000,00	Kota Batam, Sekupa ng, Sungai Harapa n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat penceg ahan dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Imple menta si Refor masi Birokra si dalam rangka pening katan pelaya nan masya rakat			153.457. 337,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N
	1.04.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuha n Pelayanan Umum Perkantora n	100 %	100 %		100 %	100 %	1.076.88 1.400,00	805.495. 414,00	637.517. 100,00	- 439.364. 300,00			Memper kuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat penceg	4. Imple menta si Refor masi Birokr asi dalam rangk a penin gkata	ASN Dinas Perumahan , Kawasan Permukima n dan Pertamana n		586.748. 700,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N

															ahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	n pelayan masyarakat				
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.576.900,00	4.222.800,00	4.215.300,00	- 3.361.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			7.232.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 Paket	13 Paket		6 Paket	11 Paket	448.001.300,00	428.653.214,00	406.943.400,00	- 41.057.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			243.013.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	63 Paket	3 Paket		10 Paket	3 Paket	92.723.200,00	85.032.400,00	37.822.400,00	- 54.900.800,00	Kota Batam, Sekupang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat reformasi politik,	4. Implementasi			64.640.000,00	DINAS PERUMAHAN,

			Kantor yang Disediakan									Sungai Harapan	H (PAD)	hukum dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat				KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	12 Laporan		40 Laporan	12 Laporan	528.580.000,00	287.587.000,00	188.536.000,00	- 340.044.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		271.862.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %	3.481.929.000,00	1.133.706.000,00	1.115.928.000,00	- 2.366.001.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertamanan	2.473.715.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

	1.04.01. 2.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit		1 Unit	0 Unit	484.095.000,00	0,00	0,00	- 484.095.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01. 2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit		1 Unit	0 Unit	292.020.000,00	0,00	0,00	- 292.020.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			341.568.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	416 Unit	74 Unit		81 Unit	68 Unit	528.531.700,00	369.180.300,00	369.180.300,00	- 159.351.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka			214.132.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															kuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	peningkatan pelayanan masyarakat				MANA N
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	477 Unit	81 Unit		13 Unit	43 Unit	1.546.405.300,00	764.525.700,00	746.747.700,00	- 799.657.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.171.060.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit	0 Unit	630.877.000,00	0,00	0,00	- 630.877.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			746.955.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %	273.320.368,00	228.333.600,00	315.277.600,00	41.957.232,00			Memperkuat reformasi politik,	4. Implementasi Reformasi	-		248.490.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWA

			sesuai perencanaan												hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	masi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat					SAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	228.333.600,00	228.333.600,00	315.277.600,00	86.944.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			248.490.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	0	44.986.768,00	0,00	0,00	- 44.986.768,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA	

															narkoba, judi, dan penyelu dupan.					
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %	2.016.534.700,00	2.050.634.700,00	2.556.489.900,00	539.955.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		937.586.540,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		2 Unit	1 Unit	68.048.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			75.329.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	27 Unit	23 Unit		24 Unit	28 Unit	473.866.000,00	504.206.000,00	504.923.200,00	31.057.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi	4. Implementasi Reformasi Birokrasi			480.668.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	si dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat				UKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	51 Unit		58 Unit	88 Unit	60.770.000,00	60.770.000,00	60.770.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			66.187.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		1 Unit	4 Unit	1.413.850.700,00	1.413.850.700,00	1.918.988.700,00	505.138.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			315.401.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	96,58 %	85,43 %		86,38 %	86,38 %	19.470.217.584,00	16.542.208.100,00	17.135.901.162,00	229.206.936,00							19.699.424.520,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten /Kota	15 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	930.347.900,00	429.356.700,00	429.356.700,00	- 500.991.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		168.712.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.685.900,00	16.977.600,00	16.977.600,00	- 191.708.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastr			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

															mendoro ng kewiraus ahaan, mengem bangkan industri kreatif serta mengem bangkan agromari tim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi .	uktur, utilitas dan aksesi bilitas infrastr uktur dasar yang moder n, merata , berkua litas dan berkel anjuta n				
	1.04.02. 2.01.000 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat , Rumah Susun, dan Rumah Khusus	5 Doku men	1 Doku men		1 Doku men	1 Doku men	310.663. 900,00	216.489. 000,00	216.489. 000,00	- 94.174.9 00,00	Kota Batam, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Melanjut kan pengem bangan infrastru ktur dan meningk atkan lapanga n kerja yang berkualit as, mendoro ng kewiraus ahaan, mengem bangkan industri kreatif serta mengem bangkan agromari tim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi .	2. Memp ercepa t pemen uhan kebutu han sarana prasar ana dasar, infrastr uktur, utilitas dan aksesi bilitas infrastr uktur dasar yang moder n, merata , berkua litas dan berkel anjuta n			74.400.0 00,00	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N

	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	410.998.100,00	195.890.100,00	195.890.100,00	- 215.108.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.		94.312.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah yang dibangun/direhabilitasi	9 unit	0 unit		1 unit	1 unit	105.517.800,00	100.568.000,00	93.168.000,00	- 12.349.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan infrastruktur	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrast	Masyarakat	125.757.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan				
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	4 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga		1 Rumah Tangga	12 Rumah Tangga	105.517.800,00	100.568.000,00	93.168.000,00	- 12.349.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			125.757.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	93,15 %	65,95 %		72,75 %	72,75 %	18.104.163.884,00	15.723.565.600,00	16.324.658.662,00	- 1.779.505.222,00			Melanjut kan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapanga n kerja yang berkuali tas, mendor ong kewirau sahaan, menge mbangk an industri kreatif serta menge mbangk an agromar itim industri di sentra produks i melalui peran aktif koperas i.	2. Memp ercepat peme nuhan kebut uhan saran a prasar ana dasar, infrast ruktur, utilita s dan akses i bilitas infrast ruktur dasar yang moder n, merat a, berku alitas dan berkel anjuta n	Masyarakat		19.094.005.820,00	DINAS PERU MAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.552.855.276,00	9.466.464.848,00	10.086.571.110,00	- 466.284.166,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Saqulun	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjut kan pengembangan infrastru ktur dan mening k atkan lapanga n kerja yang berkualitas, mendoro ng kewiraus	2. Memp ercepat pemen uhan kebutu han sarana prasar ana dasar, infrastr uktur, utilitas dan			9.547.002.910,00	DINAS PERU MAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

													g, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang		ahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan				
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang disusun	100 %	100 %		100 %	100 %	330.188.000,00	288.717.800,00	288.717.800,00	- 41.470.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		310.949.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															koperasi.					
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	195.188.000,00	5.317.800,00	5.317.800,00	- 189.870.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.			153.918.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	135.000.000,00	283.400.000,00	283.400.000,00	148.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur			157.031.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

															industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	uktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan				
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	94,50 %	73,18 %		77.97 %	77.97 %	18.388.279.195,00	11.579.442.486,00	20.202.301.786,00	- 8.903.448.438,00							9.484.830.757,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan	24 Laporan	4 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	275.509.100,00	156.429.000,00	4.624.400,00	- 270.884.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi	2. Mencepkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN

															melalui peran aktif koperasi.					
	1.04.03. 2.01.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24 Laporan	4 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	275.509.100,00	156.429.000,00	4.624.400,00	- 270.884.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN
	1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	10 Dokumen	12 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	217.093.400,00	0	0	- 217.093.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilita	Masyarakat		500.480.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN

															kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	s dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan				
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	6 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	217.093.400,00	0,00	0,00	- 217.093.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			500.480.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															koperasi					
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	81,34 %	6,67 %		25,34 %	25,34 %	17.895.676.695,00	11.423.013.486,00	20.197.677.386,00	2.302.000.691,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mencecepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		8.984.350.757,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	167 Unit Rumah	15 Unit Rumah		26 Unit Rumah	60 Unit Rumah	759.148.800,00	641.065.800,00	1.265.998.440,00	506.849.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	2. Mencecepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur,			1.103.838.414,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

															ng kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan				
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	5 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	331.095.600,00	250.612.800,00	242.695.800,00	- 88.399.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			198.452.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	130,67 Ha	0,57 Ha		98 Ha	10,65 Ha	16.555.546.295,00	10.531.334.886,00	18.688.983.146,00	2.133.436.851,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromaritim industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Menerima pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.			6.929.956.977,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.03.0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0,06 Ha	0 Ha		0,06 Ha	0 Ha	249.886.000,00	0,00	0,00	- 249.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif	2. Menerima pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar			752.103.366,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															serta mengem- bangkan agromari- tim industri di sentra produksi melalui peran aktif kope- rasi .	yang moder- n, merata , berkua- litas dan berke- lanjutan				
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani	75,00 %	0%		16.25 %	16.25 %	646.980.000,00	628.894.000,00	628.500.000,00	153.020.000,00							800.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH di luar kawasan kumuh yang ditangani	65,37 %	0		8.96 %	8.96 %	646.980.000,00	628.894.000,00	628.500.000,00	- 18.480.000,00			Melanjutkan pengem- bang infrastruktur dan mening- katkan lapangan kerja yang berkua- litas, mendor- ong kewirau- sahaan, menge- mbangkan industri kreatif serta menge- mbangkan agromar- itim industri di sentra produks- i melalui peran	2. Mempo- ncepat pemenuhan kebutuhan sarana prasar- ana dasar, infrast- ruktur, utilita- s dan aksesibi- litas infrast- ruktur dasar yang moder- n, merata, berkua- litas dan berke- lanjutan	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															aktif koperasi.					
	1.04.04. 2.01.000 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	195 Unit Rumah	0 Unit Rumah		30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	646.980. 000,00	628.894. 000,00	628.500. 000,00	- 18.480.0 00,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Menerima pemerintahan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			800.000. 000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA
5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	38,11 %	24,45 %		31,33 %	31,33 %	141.105. 905.779, 00	100.519. 169.781, 00	106.565. 083.075, 00	- 62.298.2 83.830,0 0							78.807.6 21.949,0 0	
	1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	1.492 Lokasi	398 Lokasi		282 Lokasi	282 Lokasi	141.105. 905.779, 00	100.519. 169.781, 00	106.565. 083.075, 00	- 34.540.8 22.704,0 0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening	2. Menerima pemerintahan kebutuhan	Masyarakat		78.807.6 21.949,0 0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

															katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan					N DAN PERTAMANA
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	14 Dokumen	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	298.405.800,00	198.301.600,00	297.452.400,00	- 953.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern,			283.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA	

															agromari tim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi .	merata , berkua litas dan berkel anjuta n				
	1.04.05. 2.01.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	616.419.408,00	253.914.200,00	198.232.200,00	- 418.187.208,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromari tim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.05. 2.01.001 0	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	473.716.400,00	470.757.200,00	470.292.400,00	- 3.424.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	2. Mencepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

														berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.				MANA N
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	24 Laporan	30 Laporan		255 Lokasi	75 Lokasi	15.965.835.777,00	11.448.291.485,00	11.780.827.681,00	- 4.185.008.096,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkel		4.775.903.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA N

															koperasi	anjuta n				
	1.04.05. 2.01.001 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	296 Lokasi	374 LokaS I		500 Lokas i	454 Lokas i	123.751. 528.394, 00	88.147.9 05.296,0 0	93.818.2 78.394,0 0	- 29.933.2 50.000,0 0	Kota Batam, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) SISA LEBIH PERHI TUNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBEL UMNY A PENDA PATAN BAGI HASIL	Melanjut kan pengem bangan infrastru ktur dan meningk atkan lapanga n kerja yang berkualit as, mendoro ng kewiraus ahaan, mengem bangkan industri kreatif serta mengem bangkan agromari tim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Memp ercepa t pemen uhan kebutu han sarana prasar ana dasar, infrastr uktur, utilitas dan aksesi bilitas infrastr uktur dasar yang moder n, merata , berkua litas dan berkel anjuta n			72.348.7 18.549,0 0	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.797.1 13.771,0 0	26.777.8 07.923,0 0	30.174.6 94.505,0 0	- 17.622.4 19.266,0 0							27.502.6 69.362,0 0	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							47.797.1 13.771,0 0	26.777.8 07.923,0 0	30.174.6 94.505,0 0	- 17.622.4 19.266,0 0							27.502.6 69.362,0 0	
1	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkata n luas RTH Publik	6,14%	5,92%		6,01 %	5.96 %	47.797.1 13.771,0 0	26.777.8 07.923,0 0	30.174.6 94.505,0 0	- 20.294.4 44.409,0 0							27.502.6 69.362,0 0	

	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	323,19 Ha	313,77 Ha		260,41 Ha	316.07 Ha	47.797.113.771,00	26.777.807.923,00	30.174.694.505,00	-17.622.419.266,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Menerima pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.	Masyarakat		27.502.669.362,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	85.66 Ha	30,00 Ha		32 Ha	85.66 Ha	3.835.699.300,00	1.675.736.800,00	2.106.978.460,00	-1.728.720.840,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif	2. Menerima pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar			1.664.514.240,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

															serta mengem- bangkan agromari- tim industri di sentra produksi melalui peran aktif kope- rasi .	yang moder- n, merata , berkua- litas dan berke- lanjutan				
	2.11.04. 2.01.000 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenanga- n Kabupaten/ Kota	49 Ha	40,77 Ha		24.55 Ha	42,77 Ha	13.187.3 70.099,0 0	7.334.64 7.499,00	7.232.03 3.699,00	- 5.955.33 6.400,00	Kota Batam, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	PENDA- PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjut- kan pengem- bangan infra- struktur dan meningk- atkan lapang- an kerja yang berkualit- as, mendoro- ng kewiraus- ahaan, mengem- bangkan industri kreatif serta mengem- bangkan agromari- tim industri di sentra produksi melalui peran aktif kope- rasi .	2. Memp- ercepat pem- enuhan kebutu- han sarana prasarana dasar, infra- struktur, utilitas dan aksesi- bilitas infra- struktur dasar yang moder- n, merata , berkua- litas dan berke- lanjutan			11.500.0 00.000,0 0	DINAS PERU- MAHA- N, KAWA- SAN PERM- UKIMA- N DAN PERTA- MANA- N
	2.11.04. 2.01.000 8	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenanga- n	149 Unit	27 Unit		50 Unit	41 Unit	15.594.4 76.600,0 0	10.634.2 37.500,0 0	11.681.5 47.500,0 0	- 3.912.92 9.100,00	Kota Batam, Semua Kecama- tan, Semua Kel/Des- a	PENDA- PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjut- kan pengem- bangan infra- struktur dan meningk- atkan	2. Memp- ercepat pem- enuhan kebutu- han			5.107.22 4.086,00	DINAS PERU- MAHA- N, KAWA- SAN PERM- UKIMA-

			Kabupaten/ Kota												lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.				N DAN PERTAMANA
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Unit	130 Unit		140 Unit	130 Unit	15.179.567.772,00	7.133.186.124,00	9.154.134.846,00	- 6.025.432.926,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta membangun agromartim industri di sentra produksi	2. Menerima pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan			9.230.931.036,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANA

															melalui peran aktif koperasi	berkel anjuta n				
		UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM							264.778. 557.668, 00	188.754. 553.004, 00	207.210. 400.430, 00	- 57.568.1 57.238,0 0							164.775. 241.077, 00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							216.981. 443.897, 00	161.976. 745.081, 00	177.035. 705.925, 00	- 39.945.7 37.972,0 0							137.272. 571.715, 00	
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							216.981. 443.897, 00	161.976. 745.081, 00	177.035. 705.925, 00	- 39.945.7 37.972,0 0							137.272. 571.715, 00	
1	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni				86,38 %	86,38 %	19.470.2 17.584,0 0	16.542.2 08.100,0 0	17.135.9 01.162,0 0	229.206. 936,00							19.699.4 24.520,0 0	
	1.04.02. 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase sarusun layak huni	95,15 %	65,95 %		72,75 %	72,75 %	18.104.1 63.884,0 0	15.723.5 65.600,0 0	16.324.6 58.662,0 0	- 1.779.50 5.222,00			Melanju tkan pengem bangan infrastr uktur dan mening katkan lapanga n kerja yang berkuali tas, mendor ong kewirau sahaan, menge mbangk an industri kreatif serta menge mbangk an agromar	2. Memp ercep at peme nuhan kebut uhan saran a prasar ana dasar, infrast ruktur, utilita s dan aksesi bilitas infrast ruktur dasar yang moder n, merat a,	Masyarakat		19.094.0 05.820,0 0	DINAS PERU MAHA N, KAWA SAN PERM UKIMA N DAN PERTA MANA N

															itim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	berkualitas dan berkelanjutan				
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.104.163.884,00	6.257.100.752,00	6.238.087.552,00	-11.866.076.332,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		19.094.005.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta sebagian urusan Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD